

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 KEMAUAN MENJADI WAJIB PAJAK

Kemauan adalah tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri kita sehingga kita akan termotivasi (Murdoko, 2006:31). Sehingga, kemauan untuk menjadi Wajib Pajak adalah dorongan yang berasal dari dalam diri yang menyebabkan keinginan dan motivasi untuk menjadi Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, kemauan menjadi Wajib Pajak ditujukan kepada UMKM. UMKM akan dianggap sebagai WP jika telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk dapat dikenai pajak, hal ini sesuai dengan pernyataan pada pasal 2 (1) UU KUP yaitu setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Syarat subjektif yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Syarat objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Intinya, WP memenuhi persyaratan subjektif jika mereka termasuk kedalam subjek pajak, baik itu subjek pajak luar negeri atau dalam negeri, sedangkan memenuhi syarat objektif yakni jika mereka memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak lebih dari PTKP.

UMKM yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif selanjutnya harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Pendaftaran untuk memiliki NPWP ini membutuhkan beberapa dokumen yang harus diurus terlebih dahulu. Berikut merupakan beberapa dokumen tersebut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing
2. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik
3. Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Setelah UMKM terdaftar sebagai WP, terdapat hak dan kewajiban yang nantinya harus diterima dan harus dijalankan, seperti membayar pajak dan melaporkan SPT. Sebelum melakukan pembayaran, WP UMKM terlebih dahulu harus menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Hal tersebut tergantung pada peraturan perpajakan mana yang dipakai oleh WP. Setelah melakukan

penghitungan, barulah WP dapat melakukan pembayaran. Jatuh tempo untuk pembayaran pajak adalah paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sanksi jika WP terlambat untuk membayar atau menyetor pajak adalah WP dikenai bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran.

Kemauan pada UMKM akan terlihat ketika UMKM memiliki dorongan untuk menjadi WP dengan cara setidaknya telah menyiapkan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk memperoleh NPWP. Ketika UMKM setidaknya mencari informasi mengenai penyelenggaraan pajak, salah satunya mengenai cara pembayaran, penghitungan, batas waktu yang ditentukan juga dapat dikatakan bahwa UMKM tersebut memiliki kemauan untuk menjadi WP.

2.2 WAJIB PAJAK

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dalam negeri adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Wajib Pajak Badan, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan macam Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan penghasilan yang diterimanya dapat dibagi menjadi : Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: pegawai swasta, pegawai BUMN, anggota TNI, anggota POLRI, PNS, Pensiunan, dll.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: pengusaha toko emas, pengusaha industri mie kering, pengusaha persewaan mobil, dll.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: dokter, notaris, akuntan, konsultan, dll.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan pemodalan). Contoh: penghasilan bunga pinjaman, royalti.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final. Contoh: bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, persewaan tanah dan atau bangunan, dll.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: penerima bantuan, sumbangan, hibah, dll.
6. Wajib Pajak Orang Pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri. Contoh: bunga dari luar negeri, royalti dari luar negeri, gaji dari luar negeri, dll.
7. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktik dokter.

Sedangkan Wajib Pajak badan ada 2 macam yaitu badan milik pemerintah (BUMN dan BUMD), dan badan swasta (PT, CV, lembaga, yayasan). Jika berdasarkan tempat terdaftar, WP dibagi menjadi WP domisili atau tunggal,

WP pajak pusat, dan WP cabang serta WP orang pribadi tertentu. Dari sekian banyak WP, peneliti akan membahas mengenai UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini digadang-gadang telah menjadi pondasi pendapatan negara pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan UMKM adalah

1. Usaha Mikro, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dimana kekayaan bersih yang dimilikinya paling banyak Rp 50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dimana kekayaan bersih yang dimilikinya lebih dari Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2.500.000.000.
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari RP 500.000.000 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 atau memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000.

Jika dipahami secara seksama, maka UMKM termasuk kedalam jenis WP dengan penghasilan tertentu, kecuali usaha menengah yang telah memiliki penghasilan diatas Rp 4,8 M. Pengertian WP dengan penghasilan tertentu sendiri

adalah WP yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 4,8 M dalam satu tahun pajak atau bisa disebut juga dengan WP peredaran bruto tertentu. Dua peraturan yang khusus mengatur tentang WP tersebut, yaitu PP No 46 Tahun 2013 dan PER 17 tahun 2015.

Terus bertumbuhnya jumlah UMKM yang ada di Indonesia, tidak lantas menjadikan UMKM usaha dengan tanpa ada masalah yang dihadapi. Menurut Sudaryanto, Ragimun, dan Wijayanti (2008) UMKM masih mengalami beberapa kendala seperti pemasaran barang, permodalan, infrastruktur dan informasi, serta keahlian. Kendala-kendala itulah yang mungkin menghambat pelaku UMKM untuk menjadi lebih sukses dan berkembang dibanding dengan jenis usaha besar.

2.3 JENIS PAJAK WAJIB PAJAK PELAKU USAHA

Self assessment system yang diterapkan oleh pemerintah sekarang ini menjadikan WP harus mandiri dalam mengurus perpajakannya. WP yang dikatakan menjadi pelaku usaha tidak hanya orang yang melakukan kegiatan perdagangan barang, namun juga jasa kena pajak. Oleh karena adanya tambahan kekayaan atas penyerahan barang/jasa kena pajak, Wajib Pajak harus dikenai pajak sesuai dengan jenis usaha yang dilakukannya. Jenis pajak yang dapat dikenakan kepada WP antara lain yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 25, PPN, PPh Pasal 4 ayat (2), PP 46 tahun 2013, dan PER 17 tahun 2015.

2.3.1 PP 46 Tahun 2013 (PP 46/2013)

PP 46/2013 merupakan jenis pajak yang bersifat final. Tujuan dibentuknya PP 46/2013 adalah untuk mempermudah WP OP dan badan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan beban pajaknya. Selain itu, PP 46/2013 dibuat guna menjelaskan yang dimaksud dengan pendapatan tertentu lainnya yang ada dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 17 ayat (7) UU No 38 tahun 2008. Subjek pajak dari peraturan ini adalah WP OP atau WP badan, kecuali BUT, serta menerima penghasilan dari usaha dengan jumlah peredaran bruto kurang dari RP 4,8M. Yang dikecualikan dari peraturan ini adalah WP OP yang usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang baik itu menetap atau tidak dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum, seperti pedagang asongan atau warung tenda di trotoar. Sedangkan WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau WP badan yang peredaran brutonya melebihi RP 4,8M juga tidak menjadi subjek pajak dari PP 46/2013.

Cara penghitungan beban pajak jika WP memakai peraturan ini adalah 1% x peredaran bruto/bulan. Cara tersebut dipakai jika omzet yang dimiliki kurang dari Rp 4,8M, jika omzet telah melebihi Rp 4,8M maka WP akan menghitung beban pajaknya dengan tarif umum, yaitu tarif PPh pasal 21. Jika dalam satu tahun pajak yang sedang berjalan omzet usaha dari WP telah melebihi Rp 4,8M maka penghitungan pajaknya tetap memakai aturan PP 46/2013 hingga akhir tahun pajak, barulah pada tahun pajak berikutnya WP menghitung dengan menggunakan PPh pasal 21. Seperti peraturan pajak final lain, PP 46/2013 juga tidak mengenal adanya kompensasi kerugian (pasal 8 huruf c PP 46/2013) bagi

mereka yang melakukan pencatatan, sehingga atas semua tanggungan pajaknya harus selesai pada masa pajak saat itu sekaligus.

Tarif 1% x peredaran bruto memang dapat dinilai sangat sederhana dan mudah, tetapi tidak dapat mencapai tujuan utama diterapkannya *self assessment system*, yaitu kepatuhan membayar pajak secara suka rela. Hal ini dikarenakan WP yang dulunya telah melakukan pembukuan akan merasa bahwa tidak ada gunanya melakukan pembukuan, tugas fiskus yang seharusnya lebih gencar untuk mengajak dan mensosialisasikan tentang pembukuan pasti akan menurun dengan adanya kemudahan ini, selain itu tidak dipertimbangkannya biaya-biaya yang telah WP keluarkan dan tidak adanya kompensasi kerugian juga menjadikan PP 46/2013 menjadi peraturan yang tidak mencerminkan pembayaran pajak secara suka rela seperti yang dijelaskan dalam *self assessment system*.

2.3.2 PER 17 Tahun 2015 (PER 17/2015)

Merupakan peraturan yang memuat tentang tata cara perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan 1.435 jenis kelompok lapangan usaha (KLU) yang pada dasarnya merupakan subjek pajak dari PER 17 tahun 2015. WP OP yang termasuk ke dalam subjek pajak peraturan ini, dapat menghitung pajaknya melalui pencocokan usaha WP OP dengan KLU, kemudian disesuaikan dengan lokasi usaha tersebut berada. Apakah usaha tersebut berada di 10 ibukota provinsi, ibukota provinsi lainnya, atau daerah lain.

Subjek pajak PER 17 tahun 2015 yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 4,8M selama satu tahun pajak, harus melakukan pembukuan. Sedangkan jika

subjek pajak PER 17 tahun 2015 ini memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8M selama satu tahun pajak, maka subjek pajak atau WP tersebut dapat memilih antara melakukan pembukuan atau pencatatan. WP yang lebih memilih untuk melakukan pencatatan, dapat menghitung beban pajaknya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) dengan syarat WP harus memberitahukan penggunaan NPPN sebagai dasar penghitungan penghasilan netto yang nantinya digunakan untuk menentukan jumlah beban pajak kepada DJP paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Jadi, misalkan awal tahun pajak dari usaha WP OP tersebut adalah bulan Januari, maka WP OP maksimal harus melaporkan penggunaan NPPN pada bulan Maret. Sedangkan untuk WP OP yang memiliki pekerjaan bebas atau usaha lebih dari satu, maka untuk menghitung penghasilan netto diperoleh dari penjumlahan penghasilan netto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas.

2.4 SIKAP RASIONAL

Sikap rasional menurut Hadi (dikutip oleh Santi, 2012) adalah pertimbangan WP terhadap keuangan mengenai untung dan rugi jika memenuhi kewajiban pajak beserta resiko jika membayar dan tidak membayar pajak. Santi (2012) menyimpulkan bahwa sikap rasional WP yang cenderung lebih mementingkan keuangan dan kepentingannya sendiri, mengindikasikan bahwa WP cenderung lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satu kewajiban pajak yang harus dilakukan UMKM jika telah menjadi WP adalah menghitung, membayar, memotong/memungut, dan melaporkan pajaknya.

Diterapkannya sistem *self assessment* membuat WP UMKM harus melakukan semua kegiatan tersebut secara pribadi.

Penghitungan pajak selain melibatkan tarif, juga melibatkan PTKP, dan beban lain yang dapat dikurangkan ke PKP. Sudirman dan Amirudin (2012:9) menyampaikan bahwa tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Mengenai tarif, tarif pajak yang diterapkan dalam PP 46/2013 sendiri sebesar 1%, pajak final diperoleh dari $1\% \times \text{peredaran bruto}$ setiap bulan. Sedangkan dalam PER 17/2015, Wajib Pajak akan dikenai tarif sesuai dengan PPh pasal 17. Jika dibandingkan antara PER 17/2015 dengan PP 46/2013, pada PER 17/2015 penghasilan tidak secara langsung dikenai pajak seperti yang terjadi pada PP 46/2013, namun terlebih dahulu dikalikan dengan persen NPPN, dan dikurangi dengan PTKP sehingga barulah diketahui PKP yang kemudian dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Sehingga proses penghitungan pajak yang dilakukan lebih panjang. Pengertian dari NPPN adalah pedoman yang berisi tentang suatu persentase atau angka perbandingan lainnya yang disusun sedemikian rupa; terperinci mengatur kelompok jenis usaha; dibedakan dalam beberapa klasifikasi kota/tempat; dibedakan untuk Wajib Pajak yang jumlah peredaran usahanya atau penerimaan brutonya tertentu; dan tingkat persentase atau angka perbandingan yang tidak jauh dari kewajaran (Kartiko, 2013).

PTKP yang dimaksud dalam peraturan ini sama dengan PTKP yang dimaksud dalam UU No 36 tahun 2008, yaitu

1. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
4. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Berikut penjelasan mengenai penghitungan pajak tahun berjalan dari PP 46/2013 dengan PER 17/2015:

Tabel 2.1
Perbandingan penghitungan pajak

PP No 46 Tahun 2013	PER 17 Tahun 2015
1% X peredaran bruto	$((\%NPPN \times PB) - PTKP) \times \text{tarif PPh pasal 17}$

Sumber: Data diolah, 2018

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa penghitungan pajak tahun berjalan dari PP 46/2013 terlihat lebih sederhana jika dibandingkan dengan PER 17/2015. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya PP 46/2013, salah satunya memang untuk mempermudah WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain dikenai PP No 46 tahun 2013 atau PER 17 tahun 2015, UMKM juga dapat dikenai pajak lain, seperti pajak penghasilan pasal 21,22 dan 23. Bracewell dan Milnes (dikutip oleh Suandy, 2008) berpendapat bahwa semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya

penghindaran pajak. Sehingga, banyaknya jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh UMKM, dapat membuat pola pikir mereka menjadi negatif terhadap pajak.

2.5 KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH

Kepercayaan merupakan salah satu bagian dari kesediaan untuk membuka diri kepada pihak lain (Grunig dan Hon, 1999). Sehingga, arti dari kepercayaan kepada pemerintah adalah kemauan diri kita untuk terbuka dan percaya kepada pemerintah dengan pemerintah.

James, Vazquez, dan Torgler (2005) menyebutkan bahwa kepercayaan yang lebih tinggi di suatu negara dapat memperbaiki sikap dan komitmen pembayar pajak terhadap pembayaran pajak, dengan dampak positif pada kepatuhan pajak secara keseluruhan. Sehingga, dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa terdapat kaitan antara kepercayaan dengan pembayar pajak atau WP, yang mana salah satu WP yang dimaksud termasuk UMKM. Selain itu, adanya penjelasan bahwa pajak digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat, menjadi landasan bahwa masyarakat yaitu UMKM merupakan pihak yang penting dalam perpajakan.

Dari awal terbentuknya UMKM, meskipun dapat bertahan dalam kondisi krisis ekonomi, namun tidak dipungkiri bahwa keadaan UMKM di Indonesia sampai sekarang masih banyak mengalami permasalahan yang kompleks. Permasalahan tersebut seperti kurangnya modal, Sumber Daya Manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, belum

kondusifnya iklim usaha, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki (Bestari dan Suprpto, 2014). Banyaknya permasalahan yang dialami oleh UMKM, mendorong pemerintah membuat peraturan yang dicantumkan dalam UU No 20 tahun 2008 guna membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (pasal 21 ayat (1))4. Pembiayaan berupa pinjaman yang didapat dari bank, koperasi simpan pinjam, atau lembaga keuangan bukan bank. Dalam beberapa sistem peminjaman, terdapat agunan serta bunga yang dibebankan untuk pengembalian pinjaman. Selain itu, untuk diperbolehkan meminjam ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM.
2. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru (pasal 19). Terdapat beberapa macam pelatihan yaitu kewirausahaan, keterampilan teknis, manajerial dan kompetensi. Bagi yang telah mengikuti pelatihan tersebut akan mendapat surat keterangan telah mengikuti pelatihan. Sedangkan dana pelatihan didapat dari APBN (PERMEN KOP UKM 18/PER/M.KUKM/IX/2015)
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan

(pasal 25). Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM yang dibantu oleh usaha besar. terdapat perjanjian tertulis serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika usaha besar terbukti merugikan UMKM maka dilakukan pencabutan izin usaha (PP 17/2013).

Terkait bantuan pemerintah seperti pembinaan UMKM, sebenarnya bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan adanya timbal balik antara pemerintah dengan UMKM, yaitu UMKM harus membayar pajak. Pajak UMKM harus dikenakan agar pembiayaan UMKM secara berkelanjutan bisa terwujud. Selain itu bantuan pemerintah sebenarnya merupakan sebuah investasi bagi UMKM, bukan bantuan gratis yang tidak perlu dikembalikan. Tidak akan ada dana pembinaan UMKM jika tidak ada pajak yang terkumpul (Suryana, 2013). Jadi pada intinya, bantuan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menaikkan jumlah pembayar pajak atau jumlah WP yang berasal dari UMKM.

Bantuan-bantuan yang telah dijelaskan diatas merupakan salah satu bentuk janji pemerintah. Dipenuhinya janji tersebut sebenarnya dapat mendorong UMKM untuk lebih percaya lagi kepada pemerintah. Selain itu, dipenuhinya janji tersebut, juga dapat mendorong pertumbuhan pendapatan serta kestabilan usaha, sehingga diharapkan UMKM dapat menjadi WP dan membayar pajak. Begitu juga jika yang terjadi adalah sebaliknya, jika janji tersebut tidak dipenuhi, maka kepercayaan UMKM terhadap pemerintah kemungkinan besar akan turun, karena tidak sesuai dengan ucapan dengan tindakan, akibatnya UMKM enggan untuk menjadi WP dan membayar pajak. Oleh karena itu, sudah dipenuhi atau belum janji

pemerintah serta ada tidaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan peneliti dimana dalam hal ini kepercayaan tersebut dapat diperoleh dari pemenuhan hak UMKM dalam UU No 20 tahun 2008.

2.6 PERSEPSI MANFAAT YANG DIRASAKAN

Pengertian pajak menurut UU No 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dengan kata lain, masyarakat akan memperoleh manfaat atas pembayaran pajak secara tidak langsung.

Manfaat yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak (Lubis, 2011). Adanya manfaat yang diperoleh masyarakat, menjadikan masyarakat dapat menilai seberapa besar kontribusi manfaat pajak tersebut dalam membantu kehidupan masyarakat termasuk WP. Hal ini juga dapat disebut dengan persepsi manfaat yang dirasakan.

Dimana dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak pada pemilik UMKM (2009) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persepsi manfaat pajak merupakan seberapa besar penggambaran Wajib Pajak terhadap manfaat pajak yang telah dibayarkan. Jadi pada intinya, jika kita membahas atau menganalisis mengenai persepsi manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak, maka kita akan menganalisis mengenai

tanggapan masyarakat tentang pajak melalui manfaat yang dirasakan, dimana dari proses tersebut dapat menghasilkan kesimpulan berupa cukup, baik, memuaskan, dan lain sebagainya tergantung sudut pandang WP. Seperti yang telah dijelaskan dalam situs www.pajak.go.id yang juga tercantum dalam penelitian yang dilakukan oleh Probondari (2013), hasil pembayaran pajak, digunakan untuk memberikan manfaat seperti:

1. Pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi
2. Mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat
3. Membayar utang negara ke luar negeri
4. Membantu UMKM dalam hal pembinaan dan modal
5. Pemberian bantuan untuk para pelajar yang berprestasi maupun kurang mampu
6. Peningkatan fasilitas kesehatan, penempatan para medis di setiap daerah-daerah terpencil
7. Pemberian bantuan untuk para korban bencana alam semakin cepat tersalurkan
8. Pembiayaan pertahanan dan keamanan negara

Hal-hal seperti di atas yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, dan hal tersebut juga termasuk ke dalam imbalan atau kontraprestasi secara tidak langsung kepada Wajib Pajak atas apa yang sudah dibayarkan, contohnya fasilitas KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar). Seperti yang dijelaskan oleh Staf Khusus Kemenko PMK, Palit (2014) dalam metrotvnews.com

bahwa dana KIS diperoleh dari BPJS sedangkan pengiriman kartu di danai oleh APBN. Sedangkan KIP dananya berasal dari APBN, dengan anggaran Rp 6 triliun pada tahun 2014. Oleh karena kedua program tersebut menggunakan dana APBN, dimana dalam APBN pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka kedua program tersebut termasuk ke dalam timbal balik pajak.

Dengan adanya manfaat-manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak seperti penjelasan diatas, dapat menyebabkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh untuk melakukan kewajiban perpajakan. Seperti yang dijelaskan oleh Novriansyah (2015) yaitu semakin tingginya manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak, maka akan membuat pola pikir tentang pentingnya pelaporan perpajakan, sehingga akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Oleh karena itulah, besar kecilnya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh ketaatan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan.

2.7 PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada, jadi dalam tahap pemahaman peraturan pajak, WP tidak lagi hanya sekedar tahu bahwa peraturan-peraturan tersebut ada, namun WP telah paham tentang isi serta bagaimana jalannya peraturan tersebut (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Peraturan pajak terkait dengan WP UMKM adalah PP 46/2013 dan PER 17/2015. Menurut PP 46 tahun 2013 dan PER 17 tahun 2015 pelaku usaha dapat dikenai pajak jika memiliki

peredaran bruto Rp 4,8M, sedangkan UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki penghasilan paling banyak Rp 50 M, sehingga UMKM sudah seharusnya mendaftarkan diri sebagai WP untuk memperoleh NPWP. NPWP merupakan identitas bagi WP. Berikut tahapan untuk memperoleh NPWP (pasal 5 dan pasal 6 PER 20/PJ/2013):

1. WP terlebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen
2. Menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran WP dan disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha WP.
3. Jika seluruh persyaratan telah diterima KPP atau KP2KP dan dinyatakan lengkap, maka diterbitkanlah Bukti Penerimaan Surat. NPWP akan dikirim melalui pos tercatat.

Proses untuk mendaftar sebagai WP dan memperoleh NPWP tergolong mudah, bahkan sekarang WP dapat mendaftar untuk memperoleh NPWP secara online melalui <https://ereg.pajak.go.id/login>.

Setiap peraturan pajak seperti PPh pasal 21, 22, 23 dan lain sebagainya, tentu terdapat sanksi yang akan dibebankan kepada WP jika WP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada PP 46/2013 sama sekali tidak memiliki sanksi untuk WP nya jika didapati tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (huruf G ayat (2) SE 42/PJ/2013) namun peraturan itu hanya berlaku untuk masa pajak Juli sampai Agustus 2013. Sedangkan PER 17/2015, masih terdapat sanksi yang akan dikenakan, sanksi tersebut sesuai yang tercantum dalam pasal 39 UU No 6

tahun 1983 yang terakhir kali diubah dengan UU no 16 tahun 2009, yaitu sanksi pidana kurungan selama minimal 6 bulan maksimal 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Namun, sanksi tersebut hanya berlaku jika WP tidak atau tidak sepenuhnya melakukan pembukuan, dan tidak bersedia untuk memperlihatkan pembukuan atau pencatatan, serta bukti-bukti pendukungnya (Pasal 3 ayat (3) PER 17 tahun 2015).

Selain sanksi diatas, subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi tidak mendaftarkan diri dan tidak memiliki NPWP, juga akan dikenai sanksi berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Setelah mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, maka orang tersebut telah sah menjadi Wajib Pajak orang pribadi yang harus melakukan kewajibannya serta memperoleh haknya seperti kewajiban menghitung dan membayar pajak.

WP UMKM dapat menghitung pajak terhutang setelah mereka memutuskan untuk memakai aturan yang mana, antara PP 46/2013 atau PER 17/2015 kemudian dapat melakukan pembayaran pajak. Setelah melakukan pembayaran pajak, WP akan menerima bukti pembayaran yang disebut dengan SSP (Surat Setoran Pajak). Batas waktu pembayaran atau penyetorannya sesuai batas waktu per SPT masa, jika terlambat membayar, maka WP OP akan dikenai denda bunga sebesar 2% perbulan. Tahapan selanjutnya adalah pelaporan pembayaran pajak terutang. Pelaporan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ada dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Dalam pengisian SPT, WP harus

menetapkan apakah ia menggunakan pembukuan atau pencatatan bagi usahanya. Penyampaian SPT masa paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan penyampaian SPT tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. WP OP kriteria tertentu yang penghasilannya kurang dari Rp 4,8M diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu pelaporan SPT masa. Sanksi jika terlambat menyampaikan SPT berupa denda sebesar Rp 100.000 sedangkan sanksi pidana penjara selama paling singkat 6 bulan paling lama 6 tahun.

DJP dan KPP memegang peranan penting dalam tahap pemahaman WP terhadap peraturan pajak. Hal ini dikarenakan, terdapat beberapa WP yang aktif untuk mencari dan ada juga yang tidak. Oleh karena harus meratanya pemahaman mengenai peraturan pajak ini agar tujuan dibentuknya peraturan dapat tercapai, maka KPP harus melakukan sosialisasi. Selain untuk mencapai tujuan, sosialisasi juga dapat digunakan agar WP dapat menjalankan *Self Assessment System* dengan baik dan benar.

Tahap paham dengan peraturan yang ada, tidak akan tercapai jika tidak ada niat dari WP untuk mengetahui dan mempelajari peraturan tersebut. Selain itu, tidak adanya atau masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP juga dapat mempengaruhi tingkat pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan. Tidak adanya niatan WP untuk mempelajari dan *update* mengenai peraturan pajak serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP mengakibatkan tujuan dari dibentuknya sebuah peraturan tidak akan tercapai. Misalnya kurangnya sosialisasi mengenai PP 46/2013, WP menjadi tidak tahu bahwa peraturan tersebut memiliki

beberapa fasilitas yang dapat menguntungkannya seperti adanya SKB. Oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan oleh DJP menjadi sangat penting guna meningkatkan kemauan dalam diri UKM sehingga jumlah UKM yang menjadi WP akan semakin meningkat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan landasan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi kemauan UMKM untuk menjadi WP.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

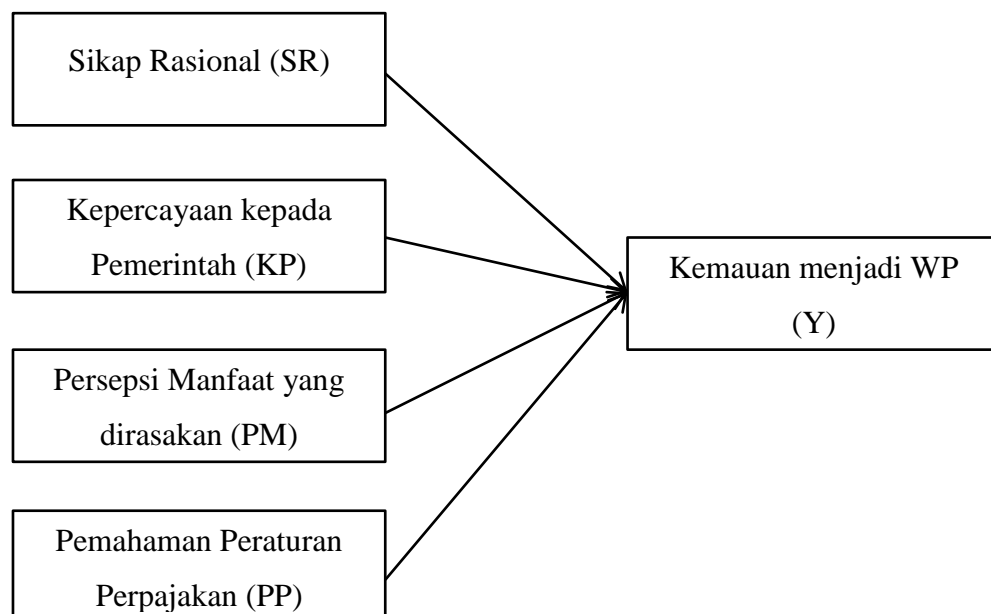
No	Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hasnapia (2016)	Pengaruh Sikap Rasional, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di KPP Pratama Makassar Selatan).	Variabel Independen: Sikap rasional, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP.
Pembeda: Subjek penelitian adalah WP OP. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang UMKM. Selain itu variabel dependen penelitian Hasnapia adalah kepatuhan WP OP, yang mana juga berbeda dengan variabel dependen penelitian ini. Satu-satunya variabel yang peneliti ambil dari penelitian ini adalah sikap rasional.				
2.	Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2013)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas	Variabel Independen: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum Variabel Dependen: Kemauan membayar pajak	Hanya variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang mempengaruhi kemauan membayar pajak WP OP yang melakukan pekerjaan bebas
Pembeda: Dari seluruh variabel independen penelitian Handayani et al, peneliti hanya mengambil variabel tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan sistem hukum yang dijadikan acuan untuk variabel pada penelitian ini berupa variabel kepercayaan kepada pemerintah. Handayani et al menjadikan WP OP yang melakukan pekerja bebas sebagai objek penelitian, sedangkan peneliti mengambil UMKM sebagai objek penelitian, sehingga peneliti memiliki objek penelitian yang lebih khusus dibanding penelitian Handayani et al. Selain itu, Handayani et al membahas kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen.				

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Probondari (2013)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan pajak Pratama Bintang	<p>Variabel Independen: Persepsi Wajib Pajak atas kualitas pelayanan aparat perpajakan, persepsi Wajib Pajak atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintahan dan hukum, serta Persepsi Wajib Pajak atas manfaat pajak yang dirasakan</p> <p>Variabel Dependen: Kemauan membayar pajak</p>	Secara simultan seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan jika secara individu, hanya variabel persepsi WP atas efektifitas sistem perpajakan yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
<p>Pembeda: WP OP yang dimaksud oleh Probondari lebih tertuju pada WP OP secara umum, sedangkan peneliti mengambil objek penelitian UKM. Semua variabel independen dan variabel dependen penelitian dari Probondari berbeda dengan variabel independen serta variabel dependen peneliti, kecuali variabel persepsi Wajib pajak atas manfaat pajak yang dirasakan. Dari banyak variabel penelitian Probondari, hanya variabel tersebut yang peneliti adopsi.</p>				

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Widayati dan Nurlis (2010)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada KPP Pratama Gambir tiga)	Variabel Independen: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan Variabel Dependen: Kemauan membayar pajak	Hanya variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
Pembeda: Objek penelitian merupakan WP OP yang melakukan pekerjaan bebas, sedangkan penelitian ini memiliki objek UMKM. Dari sekian banyak variabel ada 2 variabel yang peneliti ambil, yaitu variabel pemahaman tentang peraturan pajak dan kemauan membayar pajak. variabel kemauan membayar pajak peneliti jadikan acuan pada penelitian ini untuk variabel kemauan menjadi Wajib Pajak.				

2.9 Model Penelitian

Berikut merupakan model penelitian dari pengaruh sikap rasional, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi manfaat yang dirasakan, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan menjadi Wajib Pajak



2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.2 Pengaruh Sikap Rasional terhadap Kemauan menjadi WP

Sikap rasional adalah sebuah pemikiran yang diperoleh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut *exchange theory* (teori pertukaran sosial), dijelaskan bahwa dalam berperilaku, manusia bersikap rasional, menghitung keuntungan dan kerugian. Jika sikap rasional WP yang lebih mementingkan keuangan dan diri sendiri bertambah, maka WP lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak (Santi, 2012). Salah satu pemikiran rasional yang mungkin saja dilakukan oleh UMKM berhubungan dengan penghitungan pajak. Pada penghitungan pajak terdapat beberapa hal yang harus dimasukkan salah satunya tarif. Tarif yang berlaku dalam sistem administrasi perpajakan terdapat 4 jenis, yaitu tarif pajak tetap, tarif pajak progresif, tarif pajak proporsional, dan tarif pajak regresif. Dari berbagai jenis tarif pajak, terdapat tarif progresif dimana sesuai aturan yang berlaku, tarif tersebut akan semakin bertambah besar ketika jumlah penghasilan WP juga bertambah banyak. Tingginya tarif yang tidak sejalan dengan tingginya pendapatan UMKM, mengakibatkan UMKM menjadi keberatan untuk membayar pajak, apalagi ditambah kebutuhan produksi dan distribusi yang juga semakin tinggi karena kenaikan harga BBM (jateng.tribunnews.com, 2013). Akibat dari kejadian tersebut, kemungkinan besar UMKM akan memikirkan kembali haruskah ia menjadi WP jika dengan tidak membayar pajak pendapatan yang tidak seberapa itu bisa utuh, hingga pada akhirnya mengakibatkan UMKM enggan untuk menjadi WP.

Selain tarif, banyaknya pajak yang dapat dikenakan kepada UMKM juga dapat menjadi faktor pendorong bagi UMKM untuk lebih menguntungkan dirinya sendiri daripada harus membayar pajak. Meskipun UMKM dikenai pajak berdasar PP No 46 tahun 2013 atau PER 17 tahun 2015, tetapi mereka juga dapat dikenai PPh pasal 21, 22, dan juga 23. Beragamnya pajak yang harus mereka bayar tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang cukup tentang pajak, dapat membuat mereka berpikir bahwa pajak merupakan suatu hal yang merugikan.

Diterapkannya *self assessment system* (SAS) membuat WP harus menghitung pajaknya sendiri. Dengan adanya kewajiban yang mengharuskan WP menghitung pajaknya sendiri, hal tersebut bisa jadi membuat UMKM merasa kesusahan dan berpikir untuk lebih memilih menaikkan jumlah penjualannya sehingga keuntungan yang bisa didapat bisa bertambah daripada mendaftarkan diri sebagai WP dan mengurus pajak.

Atas kejadian-keadian tersebut peneliti menduga bahwa pertimbangan-pertimbangan mengenai banyaknya beban pajak, tarif pajak yang besar, dan Self Assessment System yang mengharuskan UMKM mengurus kewajiban pajaknya sendiri, dapat mempengaruhi kemauan UMKM menjadi WP menjadi semakin turun. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Hasnapi (2016) yang menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan WP OP. Sehingga, dapat dirumuskan hipotesis :

H1: Sikap Rasional berpengaruh terhadap Kemauan menjadi WP.

2.10.3 Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kemauan menjadi WP

Pendekatan psikologis fiskal yang dikemukakan oleh Schmolders (1959) dan disempurnakan oleh Hasseldine dan Bebbington (1991) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara baik buruknya perilaku masyarakat terhadap kejadian-kejadian, isu atau situasi ekonomi yang sedang terjadi, dengan tindakan yang pemerintah lakukan. Pendekatan tersebut menjelaskan bahwa terdapat kaitan antara kebijakan yang pemerintah ambil atau yang diterapkan oleh pemerintah, serta sikap dari pemerintah itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh terhadap baik atau buruknya perilaku masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak pejabat negeri yang melakukan tindakan korupsi. Contohnya kasus Gayus, dimana statusnya adalah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak pada saat itu. Selain itu, juga terdapat kasus dugaan korupsi di Malang yang berkaitan dengan PT BWR yang merugikan negara sejumlah Rp 1,2 M, kasus korupsi Batu Roadshow “Batu Shining Investment” 2015 dengan potensi kerugian Rp 1 miliar, kasus dugaan korupsi pembangunan Block Office 2009-2016. Dimana jika di total kasus dugaan korupsi yang terjadi di pemerintahan Kota Malang tersebut merugikan negara hingga Rp 67,3 miliar. Kasus seperti inilah yang kemungkinan besar mempengaruhi *mindset* masyarakat sehingga menyebabkan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Akibat adanya krisis kepercayaan kepada pemerintah, masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak. Karena masyarakat berpikir bahwa akan percuma jika membayar beban pajak secara penuh jika pemerintah masih menyalahgunakan kepercayaan dan uang pajak yang

telah dibayarkan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga berakibat pada tidak bisa dirasakannya hasil atas pembayaran pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Evi Hartanti dalam pengertianpakar.com (2015), dimana menurut Evi Hartanti adanya korupsi mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Apabila banyak pejabat pemerintah melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala tindakan dan anjuran pemerintah.

Kepercayaan dalam penelitian ini, selain bisa didapat dari pelaksanaan kewajiban dan tugas dengan sungguh-sungguh, peneliti menduga kepercayaan kepada pemerintah juga dapat diperoleh dengan cara menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh UMKM, dimana permasalahan paling umum adalah mengenai sumber modal. Permasalahan ini sebenarnya berkaitan dengan bantuan-bantuan yang seharusnya pemerintah berikan kepada WP pelaku usaha yaitu UMKM. Penanganan serta hasil yang baik atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dapat menimbulkan tingginya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat tidak lagi enggan untuk membayar pajak.

Pada kenyataannya, banyak pemilik UMKM yang masih mengeluh mengenai sulitnya mendapatkan pinjaman modal dari bank. Hal ini dikarenakan bank memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar mereka dapat memperoleh pinjaman tersebut, salah satunya adalah adanya pencatatan/pembukuan usaha. Dirangkum dari elshinta.com dan surabaya.bisnis.com (2016) UMKM di Malang mengakui kesulitan untuk mendapatkan akses modal dari bank karena adanya

agunan serta persyaratan yang rumit. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari mayoritas UMKM emping jagung di kelurahan Pandanwangi Blimbing, Malang. Mereka menjelaskan bahwa belum merasakan program bantuan modal dari pemerintah, bahkan ada yang tidak berharap bantuan tersebut disebabkan dalam mengurus peminjaman modal membutuhkan beberapa syarat yang dianggap kurang efisien bagi mereka, akibatnya UMKM lebih memilih untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro yang memiliki beban dan resiko yang cukup berat (Anggraeni, Hardjanto, dan Hayat, 2013). Janji pemerintah yang akan memberikan bantuan seperti permodalan pada kenyataannya masih belum dirasakan oleh UMKM. Oleh karena bantuan tersebut belum dirasakan, maka UMKM juga enggan untuk menjadi WP dan membayar pajak.

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Malang serta bantuan pemerintah seperti sumber modal bagi UMKM yang kurang dirasakan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi turun. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa kepercayaan kepada pemerintah melalui dipenuhi atau tidaknya hak-hak yang dijanjikan serta mampu tidaknya menjaga komitmen untuk tidak memperkaya diri sendiri dapat mempengaruhi UMKM untuk menjadi WP. Pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2013) menghasilkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar WP OP yang melakukan pekerjaan bebas. Sehingga disini peneliti mencoba mengkaji hipotesis yang belum terbukti sebelumnya dengan sedikit perubahan pada variabel independen, yaitu sebagai berikut:

H2: Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh terhadap Kemauan menjadi WP.

2.10.4 Persepsi Manfaat yang Dirasakan Berpengaruh Positif terhadap Kemauan menjadi WP

Pajak memberikan manfaat secara tidak langsung kepada Wajib Pajak. Meskipun diberikan secara tidak langsung dan diberikan kepada masyarakat umum, namun Wajib Pajak masih bisa menilai seberapa besarnya manfaat yang diterima atas kepatuhan sikapnya tersebut. Jadi, dengan membayar pajak, masyarakat akan memperoleh hal-hal seperti subsidi pangan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya.

Manfaat-manfaat yang didapatkan melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah untuk masyarakat dan juga WP tersebut, secara tidak langsung dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat bahwa terdapat manfaat atau timbal balik yang didapat dari pembayaran pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Widaningrum (2007) kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Barang atau jasa disini dapat dianggap sebagai manfaat, imbalan atau hak atas apa yang telah WP UMKM penuhi dari kewajiban perpajakannya.

Manfaat-manfaat atau timbal balik atas pembayaran pajak misalnya adalah dalam layanan kesehatan yang difasilitasi KIS atau BPJS. Keberhasilan KIS atau BPJS untuk membantu masyarakat dalam hal kesehatan, dapat membuat masyarakat merasakan bahwa timbal balik dan pertolongan dari pemerintah itu

ada, sehingga mereka pun akan dengan senang hati akan menjadi WP dan membayar pajak, begitu pula jika keadannya sebaliknya, pasti masyarakat enggan untuk menjadi WP. Probondari (2013) menjelaskan adanya harapan bahwa mereka akan mendapat imbalan berupa fasilitas dari pemerintah atas pembayaran pajak yang telah mereka lakukan, secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh membayar pajak.

Hal-hal seperti diatas yang peneliti duga dapat mempengaruhi tingkat baik buruknya persepsi masyarakat tentang manfaat atas pembayaran pajak. Penjelasan tersebut dilandasi oleh teori harapan yang menjelaskan bahwa motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan adanya harapan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Jika peluang dan harapan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya kecil, maka motivasinya untuk berupaya akan semakin rendah, Sudrajat (dikutip oleh Annisa dan Handayani, 2015).

Adanya harapan akan diperolehnya sesuatu yang diinginkan oleh WP terutama UMKM jika membayar pajak, menjadikan masyarakat memiliki tanggapan yang positif atas pembayaran pajak. Sehingga, meningkatnya pemikiran mengenai kurangnya manfaat pajak yang dirasakan, menjadikan UMKM lebih tidak ingin menjadi WP. Penelitian yang dilakukan oleh Probondari (2013) menyatakan bahwa persepsi WP atas manfaat pajak yang dirasakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak WP OP di KPP Pratama Bintan. Oleh karena itu, peneliti disini mencoba mengkaji hipotesis yang belum terbukti

sebelumnya dengan sedikit perubahan pada variabel independen, yaitu sebagai berikut:

H3: Persepsi Manfaat yang Dirasakan berpengaruh terhadap Kemauan menjadi WP

2.10.5 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan menjadi WP

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan, maka diharapkan terjadi peningkatan pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yaitu semakin tahu dan paham WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula WP terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Pemahaman mengenai besarnya penghasilan yang dapat dikenai pajak juga sangat penting. Hal ini karena, jika UMKM mengetahui bahwa dirinya telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, jika UMKM paham dan ingin bersikap taat, maka selanjutnya UMKM harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dengan adanya pemahaman mengenai peraturan pajak serta adanya kemauan dari dalam diri UMKM diharapkan dapat membantu tujuan DJP untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Kenyataannya Wajib Pajak yang berasal dari

golongan UMKM jumlahnya masih sedikit terbukti pada perbandingan data antara jumlah WP dari Dinas Koperasi dan laporan tahunan DJP yakni jumlah UMKM yang mencapai 50 juta lebih, tetapi jumlah dari WP secara keseluruhan hanya mencapai 20 jutaan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa UMKM masih memiliki keinginan yang rendah untuk menjadi Wajib Pajak.

WP yang memakai dasar penghitungan pajak berdasar PP 46/2013 dikenai sanksi seperti halnya yang tercantum pada UU KUP yaitu 2% tiap bulan untuk keterlambatan penyetoran dan pembayaran. Adanya pengetahuan mengenai sanksi inilah yang dapat mendorong kemauan UMKM untuk menjadi WP meningkat. Hal ini karena jika mereka mengetahui terdapat sanksi yang harus mereka tanggung jika tidak menjadi WP dan tidak melakukan kewajiban pajak, maka mungkin saja mereka akan lebih memilih untuk mendaftar menjadi WP, karena pertimbangan bahwa sanksi tersebut jumlahnya akan bertambah terus menerus jika UMKM masih menghindar dari kewajibannya.

Sanksi dan hal-hal lain diatas tidak akan diketahui oleh UMKM jika UMKM tidak memiliki inisiatif untuk mempelajari peraturan pajak. Hal lain yang juga dapat memperparah ketidakpahaman UMKM mengenai peraturan adalah tidak ada atau kurangnya sanksi dari dinas terkait yaitu DJP. Pada dasarnya sosialisasi tidak hanya mengenai keuntungan atau kerugian tetapi juga terkait peraturan itu sendiri. Bagaimana peraturan tersebut, apa isinya, berapa tarifnya, bagaimana sistemnya, dan lain sebagainya. Jika UMKM sendiri tidak tahu bahwa peraturan tersebut ada, bahkan jika peraturan itu dinilai sangat menguntungkan bagi UMKM, maka UMKM akan tetap tidak tertarik menjadi WP. Penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Widyati dan Nurlis (2010) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak WP OP yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Gambir Tiga. Berikut hipotesis yang dapat dibentuk:

H4 : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan menjadi WP.